



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK
DAN PERSANDIAN**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat- Nya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai komitmen serta tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2018 - 2025, yang dibuat secara periodik dan berisikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Kepala Dinas

HOTDEN MANTO MANALU, S.Si, Apt, M.Si
★ Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 197111192000121001
KATINGAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAFTAR

GAMBAR IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Fungsi dan Tugas
- 1.3. Isu – Isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
 - 2.1.1. Sasaran Daerah
 - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Strategis, Program, dan Kegiatan
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025
 - 2.3.1 Target Belanja
 - 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A Capaian Kinerja Organisasi

- 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
 - 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
 - 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap target Renstra sebelumnya
 - 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional;
 - 3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Alternatif Solusi yang dilakukan
 - 3.2.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 3.2.6 Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 - 3.2.7 Dukungan Inovasi dalam Pencapaian Kinerja
 - 3.2.8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 3.2.9 Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja dan Peran OPD dalam Pencapaian Sasaran

B. Realisasi Anggaran Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025 ini disusun.

LKIP ini menyajikan capaian indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan kinerja. Selain itu LKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan secara menyeluruh.

Namun masih ada sejumlah sasaran yang tidak maksimal pencapaiannya dan ada kegiatan yang belum memperlihatkan outcome karena berada diluar kontrol dan ketersediaan indikator input berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana belum maksimal. Sehubungan dengan itu maka pada tahun-tahun berikutnya outcome akan terus dipantau dan diupayakan seoptimal mungkin agar indikator penilaian tersebut dapat lebih meningkat. Peningkatan indikator tersebut merupakan target utama karena nilai capaian lebih mendekati sasaran, tujuan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Langkah-langkah demikian dapat meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan pada masa yang akan datang.

Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Katingan dan Wakil Bupati Katingan yang telah dituangkan dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2018 - 2025.

Pencapaian kinerja input atau penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan pada tahun 2025, berdasarkan DPPA Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 11.049.007.363,-** (Sebelas Milyar Empat Puluh Sembilah Juta Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah),- dan realisasi **Rp. 10.656.493.044,-** (Sepuluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) atau **96.45 %** dan **Realisasi Kinerja Fisik sebesar 100%**

Berikut adalah Pencapaian Kinerja Tahun 2025 dari 4 (empat) dari Urusan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan adalah :

1. Sekretariat dengan Indikator :
 - Nilai Lakip dengan Target Predikat Baik (70.96) Realisasi dengan Predikat Sangat Baik (72.02).
2. Komunikasi dan Informatika
 - Indeks SPBE dengan Target Predikat Baik (3.26) Realisasi dengan Predikat baik (4.04)
 - Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan Target (91.00) Realisasi (91.13)

3. Statistik

- Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Target 100 % Realisasi 100%.

4. Persandian

- Indeks Kami dengan Target Predikat Huruf Cukup Realisasi Predikat Cukup Baik (407).

Upaya kedepan adalah dengan mengevaluasi beberapa kegiatan baik dari segi anggaran maupun target sasaran dengan membangun komitmen bersama dengan menuangkan dalam Perjanjian Kinerja antar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan dengan pejabat eselon di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Dan Pada Tahun berikutnya dapat menjadi lebih baik lagi.

BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Badan/Dinas menyusun Laporan kinerja Tahun 2025 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Dinas/Badan Tahun 2025 berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Peraturan Bupati Katingan Nomer 21 Tahun 2023 tentang Penerapan Sstem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Petunjuk Teknis Pengukuran, Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas/Badan Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas/Badan;
2. Mendorong Dinas/Badan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas/Badan untuk meningkatkan kinerja;
4. Memberikan kepercayaan kepada publik terhadap Dinas/Badan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

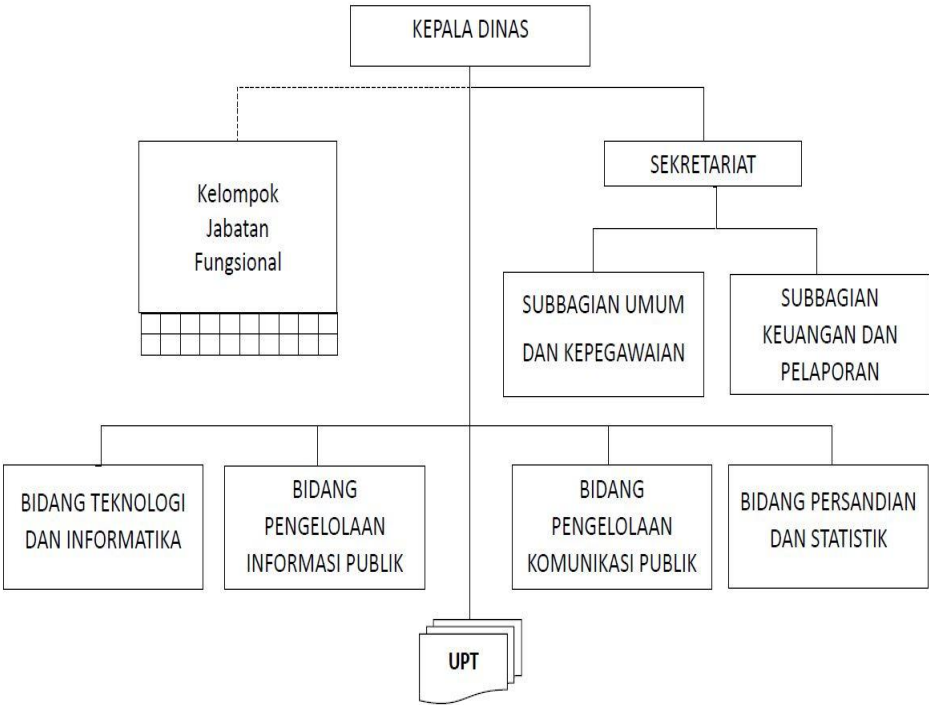
1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan merupakan salah satu lembaga/perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang meliputi : kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan, mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Dalam peranannya sebagai Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, globalisasi informasi dan perkembangan di segala bidang merupakan tuntutan dan tantangan tapi juga sekaligus peluang bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat digunakan sebagai media informasi menyebarluaskan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Dinas publik secara berkala, serta dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu.

Gambar 1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIKDAN PERSANDIAN KABUPATEN
KATINGAN



1.2 Fungsi dan Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Katingan , Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informasi, bidang Statistik dan bidang Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan adalah membantu Bupati Katingan melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informastika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian yang mejadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Katingan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Susunan organisasi SKPD terdiri dari:

- a. *Kepala SKPD/Dinas;*
- b. *Sekretariat terdiri dari:*
 - 1. *Subbagian Umum dan Kepegawaian;*
 - 2. *Subbagian Keuangan;*
- c. *Bidang Teknologi dan Informatika;*
- d. *Bidang Pengelolaan Infomasi Publik;*
- e. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
- f. Bidang Persandian dan Statistik;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

1.3 ISU – ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju kearah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang menjadi dasar kebijakan penetapan tujuan dan sasaran daerah, sehingga program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Menuju Kabupaten Katingan Smart City, merupakan konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan untuk mengelola daerah dan kebutuhan pemerintah/masyarakat, terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien untuk mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tidak terduga.

1. Pembentukan Desa Digital.

Sebagai sebuah unit terkecil yang ada di pemerintahan, desa akan mendukung terciptanya kota pintar atau smart city. Desa digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi. Pengembangan kedepannya, seluruh pelayanan publik di desa akan didigitalisasi, koneksi internet akan dibenahi, pembangunan command center, dan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan sekaligus mengenalkan produk unggulan di wilayahnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan didorong dalam mempromosikan produk-produk lokal desa menggunakan market place bekerja sama dengan startup lokal menggunakan internet of things (IoT) untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi aktivitas ekonomi. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat melalui inovasi digital.

Diskominfo persantik akan bekerjasama dengan desa dalam hal :

- Penyediaan jaringan internet
- Perangkat Command Centre dan CCTV
- Penyediaan Aplikasi Layanan Publik dan Market Place
- Pembuatan Website desa

Diskominfo persantik akan bekerjasama dengan Universitas lokal dalam hal pendampingan dan pembinaan masyarakat desa dalam menggunakan aplikasi dan website desa.

Dengan adanya Program Percepatan Akselerasi Sinyal 4G melalui pembangunan BTS untuk mengcoverage sinyal 4G pada 108 desa/kelurahan di Kabupaten Katingan akan sangat membantu Kabupaten Katingan menjadi "Smart City".

2. Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Publik.
Dimaksudkan untuk melaksanakan dan mengembangkan kerjasama informasi antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan pihak media massa yang bermutu dan berkesinambungan. Pembentukan Tim PPID dan tersusunnya daftar informasi publik, Peningkatan dan Pemberdayaan KIM serta Tersedianya informasi publik dan dokumentasi yang berkualitas.
3. Ketersediaan dan Pengelolaan Aplikasi, Domain/Sub Domain Milik Pemerintah yang berkualitas.
Dimaksudkan untuk mengembangkan aplikasi, domain/sub domain milik pemerintah, khususnya milik Pemerintah Kabupaten Katingan yang bermutu dan tepat guna. Ketersediaan aplikasi milik pemerintah yang berkualitas dan optimalisasi pengelolaan domain/subdomain.
4. Terpusatnya jaringan dan aplikasi dalam 1 data.
Dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik atau informasi tentang perkembangan Kabupaten Katingan pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Katingan pada khususnya. Ketersediaan Dokumen Data Statistik Sektoral Kabupaten Katingan yang akurat dan aktual.
5. Pengamanan informasi pada setiap SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan . Di maksudkan untuk meningkatkan penyediaan data persandian yang akurat dan actual. Ketersediaan SDM, Ketersediaan Data persandian yang akurat dan aktual

1.4 KEADAAN PEGAWAI

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Per 30 Desember 2025 sebanyak orang terdiri Orang PNS dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel I.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	-
2.	SMP/Sederajat	1	-	1
3.	SMA/Sederajat	5	2	7
4.	D3	0	-	0
5.	D4	0	0	0
6.	S1	22	12	34
7.	S2	3	2	5
Jumlah				47 Orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian,2026

b. Berdasarkan Golongan

Tabel I.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	3	3	6
2.	Golongan III	8	5	13
3.	Golongan II	3	0	3
4.	Golongan I	1	0	1
5.	Golongan IX	13	7	20
6.	Golongan V	2	2	4
Jumlah PNS				47 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian,2026

c. Berdasarkan Jabatan

Tabel I.3 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Badan	1	0	1
2.	Sekretaris	0	1	1
3.	Kepala Bidang	2	2	4
4.	Kepala Sub Bagian	1	1	2

5.	Jabatan Fungsional Tertentu	4	5	9
6.	Jabatan Fungsional Umum	6	0	6
6	PPPK	15	9	24
Jumlah				47 Orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2026

d. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Tabel I.4 Jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja*

No.	Bidang	Kebutuhan Pegawai Sesuai Beban Kerja	Bezetting	Selisih
1.	Kepala Badan	1 orang	1 orang	-
2	Sekretaris	1 orang	1 orang	-
3.	Sekretariat	22 orang	19 orang	3 orang
4.	Bidang TI	17 orang	9 orang	8 orang
5.	Bidang Standi	11 orang	3 orang	8 orang
6.	Bidang PIP	13 orang	7 orang	6 orang
7.	Bidang PKP	11 orang	7 orang	4 orang
Jumlah		76 orang	47 orang	29 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, 2026

1.5 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tidak kalah pentingnya, karena untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta kenyamanan dalam bekerja.

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Genset Cat Generator	1	-	1
2	Kendaraan Roda 4	5	1	6
3	Kendaraan Roda 2	16	1	17
4	Printer	38	19	57
5	Laptop	32	13	45
6	Komputer	15	16	31
7	Lemari Arsip	22	9	31
8	Meja ½ Biro	78	12	90
9	Kursi Putar	5	1	6
10	Kursi Lipat	45	30	75
11	Ac	21	2	23
12	Camera	3	10	13
13	Perangkat Zoom	2	-	2
14	Drone	1	-	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
15	CCTV	12	-	12
16	Sound System Set	1	-	1
17	Televisi	9	-	9
18	Lemari Pendingin	3	1	4
19	Dispenser	3	-	3
20	Lcd Proyektor	2	-	2
21	Bangunan Ruang Media Center	1	-	1
22	Bangunan Kantor	1	-	1
23	Bangunan Ruang Server	1	-	1
24	Bangunan Gudang	1	1	2
25	Bangunan Ruang Genset	1	-	1
26	Bangunan Gedung ex TVRI	1	-	1

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2025

1.6 KEUANGAN

Dukungan pendanaan untuk melaksanakan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan pada tahun 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp 11.420.678.759 dan pada bulan Oktober 2025 disusunlah APBD Perubahan (APBD-P) 2025 sebagai upaya penyesuaian-penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Subkegiatan di Dinas/Badan karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tidak ada Perubahan karena hanya menggeser dari kegiatan yang ada. Ringkasan APBD dan APBD-P 2025 pada Dinas/Badan di tunjukan pada Tabel 1.6, sebagai berikut:

Tabel I.6 Ringkasan Anggaran Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Belanja Daerah	13.671.752.258,00	10.273.982.759,00
Belanja Operasi	13.671.752.258,00	10.273.982.759,00
Belanja Pegawai	4.575.345.666,00	4.359.761.841,00
Belanja Barang dan Jasa	9.096.406.592,00	5.914.220.918,00
Belanja Modal	735.242.314,00	775.024.604,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260.360.314,00	300.142.604,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	474.882.000,00	474.882.000,00
Jumlah	14.406.994.572,00	11.049.007.363,00

,(Sumber: DPPA Diskominfostandi Tahun 2025)

Rincian program dan kegiatan dari APBD dan APBD-P Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan ditunjukan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7 Rincian Anggaran Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp. 14.406.994.572	Rp. 11.049.007.363
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp. 13.990.403.772	Rp. 10.763.584.563
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.839.708.266	Rp. 6.039.692.616
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 100.261.952	Rp. 72.889.072
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 57.222.272	Rp. 37.699.352
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 43.039.680	Rp. 35.189.720
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.661.949.389	Rp. 4.413.050.721
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.569.345.666	Rp. 4.359.761.841
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 46.114.464	Rp. 35.728.544
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 46.489.259	Rp. 17.560.336
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 59.127.500	Rp. 1.300.040
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 39.127.500	Rp. 1.200.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 20.000.000	Rp. 100.040
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 575.514.485	Rp. 364.298.364
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 18.018.908	Rp. 18.018.908
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 54.425.762	Rp. 54.425.762
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 44.742.903	Rp. 26.051.736
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 122.240.700	Rp. 23.795.700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 66.600.212	Rp. 93.720.258
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.586.000	Rp. 5.586.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 263.900.000	Rp. 142.700.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 424.710.000	Rp. 424.710.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 424.710.000	Rp. 424.710.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 525.520.000	Rp. 349.328.899
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 146.600.000	Rp. 134.600.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 75.580.000	Rp. 28.310.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 303.340.000	Rp. 186.418.899
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 492.624.940	Rp. 414.115.520
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 343.719.940	Rp. 388.250.670
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 148.905.000	Rp. 25.864.850
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 2.755.756.597	Rp. 1.010.532.888
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.755.756.597	Rp. 1.010.532.888
Relasi Media	Rp. 1.996.081.191	Rp. 550.000.353
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp. 41.325.651	Rp. 21.650.000
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Rp. 119.579.041	Rp. 88.529.078
Pelayanan Informasi Publik	Rp. 74.000.000	Rp. 41.700.396
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Rp. 63.618.186	Rp. 56.358.186
Diseminasi Informasi	Rp. 108.585.502	Rp. 100.170.000
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 117.589.575	Rp. 53.874.502
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Rp. 30.749.342	Rp. 53.605.000
Penyusunan Konten	Rp. 158.077.036	Rp. 35.389.380
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Rp. 46.151.073	Rp. 9.255.993
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 4.394.938.909	Rp. 3.713.359.059

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.394.938.909	Rp. 3.713.359.059
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Rp. 177.924.946	Rp. 84.644.246
Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Rp. 187.388.976	Rp. 53.677.976
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Rp. 165.660.000	Rp. 70.388.900
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Rp. 364.457.087	Rp. 364.457.087
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Rp. 337.240.400	Rp. 188.769.350
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Rp. 30.260.000	Rp. 3.116.000
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Rp. 152.950.000	Rp. 49.348.000
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Rp. 2.979.057.500	Rp. 2.898.957.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Rp. 266.473.613	Rp. 209.473.613
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 266.473.613	Rp. 209.473.613
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 266.473.613	Rp. 209.473.613
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Rp. 63.845.973	Rp. 56.845.973
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Rp. 202.627.640	Rp. 152.627.640
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Rp. 150.117.187	Rp. 75.949.187
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 150.117.187	Rp. 75.949.187
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 150.117.187	Rp. 75.949.187
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 40.368.000	Rp. 26.400.000
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp. 109.749.187	Rp. 49.549.187
Jumlah Pagu	Rp. 14.406.994.572	Rp. 11.049.007.363

(Sumber: DPPA Diskominfostandi Tahun 2026)

1.1 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini berisi tujuan penyusunan Laporan Kinerja;
2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan realisasi keuangan;
3. Sasaran strategis dan program Kegiatan Tahun 2025.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang Penjelasan Umum Perangkat Daerah Dinas/Badan yang terdiri dari Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi, isu strategis, keadaan Sumber Daya (keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana, keuangan) dan sistematika penulisan Laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Perencanaan Strategis Tujuan dan Sasaran Dinas/Badan, Strategi, Program dan Kegiatan, Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan tentang capaian kinerja Dinas/Badan antara lain: Capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau yang sejenis, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dukungan inovasi dalam pencapaian kinerja, kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja dan peran OPD dalam pencapaian sasaran, dan Realisasi Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi, rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerjanya dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

Pada bagian ini disajikan bagan struktur organisasi, cascading/pohon kinerja, perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, matriks tindaklanjut LHE SAKIP tahun 2023, foto-foto penghargaan yang diperoleh (jika ada).

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan yang baik berdampak pada keberhasilan kinerja Perangkat Daerah, oleh karenanya perlu adanya perencanaan strategis yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan Strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Renstra Dinas/Badan Tahun 2025-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPD Kabupaten Katingan 2025-2026. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya di tuangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kabupaten Katingan 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel II.1 Ringkasan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Katingan 2025-2029

Tujuan	Sasaran Daerah
Mewujudkan Manusia yang Berkualitas	- Terwujudnya Pendidikan Berkualitas pada semua jenjang dasar sebagai fondasi utama penyiapan manusia berkualitas - Tersedianya calon tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing dan tangguh
Meningkatnya cakupan dan Kualitas pelayanan Kesehatan yang inklusif bagi semua masyarakat	- Terwujudnya akses pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi semua masyarakat - Terciptanya budaya hidup sehat dan menyehatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat - Terciptanya budaya hidup sehat dan menyehatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Mendorong pertumbuhan sector ekonomi daerah yang produktif dan berkelanjutan	- Terwujudnya sector ekonomi produktif yang progresif - Terimplementasikannya IPTEK dan ketangguhan kewirausahaan daerah - Terwujudnya penerpan ekonomi hijau
Mendorong penguatan iklim usaha dan investasi daerah yang kompetitif dan adaptif	- Terwujudnya integrasi ekonomi daerah - Terbangunnya tenaga kerja yang berkompentensi dan kompetitif. - Terwujudnya perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
Menyediakan pelayanan publik yang berintegritas, berdampak, responsive dan aksesibel	- Tercapaiannya kejelasan regulasi dan perluasan akses pelayanan public - Terwujudnya forum dan mekanisme musrenbang dan mekanisme penanganan aduan untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam pelayanan public - Terjaminnya tata Kelola hukum yang berkeadilan - Terciptanya mekanisme monitoring dan evaluasi pelayanan yang melibatkan masyarakat yang transparan, akuntabel dan partisipatif - Tercapaiinya optimalisasi aksesibilitas SPBE
Meningkatkan kolaborasi dalam rangka penguatan daya saing daerah	- Terwujudnya pembangunan kolaboratif penguat daya saing daerah
Membentuk dasar kestabilan politik, hukum, dan keamanan daerah	- Terbentuknya fondasi kestabilan politik, hukum dan keamanan daerah
Meningkatkan stabilitas ekonomi maro daerah	- Terciptanya kestabilan ekonomi makro daerah yang mendukung investasi dan daya saing daerah
Mewujudkan kondusivitas birokrasi yang efisien dan ideal	- Terbangunnya system birokrasi yang efisien dan akuntabel
Mewujudkan perlindungan terhadap kelompok rentan	- Terlindunginya kelompok rentan
Menguatkan masyarakat beragam maslahat dan berbudaya	- Terimplementasikannya nilai-nilai religious yang moderat dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat

(Sumber: RPD Kabupaten Katingan 2025-2026)

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan mendukung pada pencapaian Tujuan Menyediakan Pelayanan Publik yang berintegras, berdampak, responsive dan aksesibel

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika statistik dan Persandian Kabupaten Katingan selama 5 tahun anggaran telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut.

Tabel II.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNANA		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai (angka)	75	80.99	90.05
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Indeks SPBE	Perdikat Huruf	Cukup	Baik	Baik
3	Meningkatnya kualitas data statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pembangunan daerah	Persentase	100	100	100
4	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.	Indeks KAMI	Perdikat Huruf	Cukup	Cukup	Cukup
5	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Kabupaten / Kota	Nilai AKIP	Perdikat Huruf	Baik	Baik	Baik

Tabel II.3

Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan berdasarkan Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya literasi digital masyarakat dan pemerataan akses TIK di seluruh wilayah Kabupaten Katingan.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Katingan	Skor	41	41,7	42	42,6	43
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,26	-	-	-	-
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik digital yang responsif, transparan, dan berbasis data.	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	Skor	-	1,8	1,9	2	2,1
4	Terjaminnya keterbukaan informasi publik yang akurat, mudah diakses, dan tepat waktu oleh masyarakat.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	91	91,5	92	92,5	93
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase	100	100	100	100	100
6		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	82	85	87	90	92
7		Persentase desa / kelurahan terlayani akses internet yang baik	Persentase	82	83	84	85	86
8	Tersedianya layanan informasi publik yang terbuka, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100
9	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100	100	100	100	100
10		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100	100	100	100	100
11	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	Skor	400	410	420	430	440
12	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Predikat)	Predikat	70.96	71.00	72.00	73.00	74.00

2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target kinerja di Tahun 2025, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan didukung oleh program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.3 Strategi, Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kualitas data statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Kabupaten / Kota
4	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Kabupaten / Kota	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Dinas/Badan menyusun perjanjian kinerja perubahan karena terdapat perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran seperti alokasi anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan DPA. Perjanjian Kinerja Dinas/Badan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel II.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai LAKIP	70.96
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Indeks SPBE	3.26
Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Publik	91.00 (Informatif)
Meningkatnya Kualitas Layanan Kominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.00
Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%
Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Indeks KAMI	400

Program	Anggaran
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.039.692.616,-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.010.532.888,-
Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.713.59.059,-
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	209.473.613,-
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	75.949.187,-
J u m l a h	11.049.007.363,-

Sumber Data Sekretariat

2.3 Rencana Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 11.049.007.363,- ,dalam dinamika pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perubahan kebijakan dari instansi vertikal dan kebijakan Kepala Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian penganggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui mekanisme APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2025, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan untuk Pagu Anggaran tidak mengalami perubahan tetapi hanya melakukan beberapa pergesaran antar kegiatan.

2.3.1 Target Belanja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025

Target belanja merupakan angka (jumlah) belanja yang direncanakan dan harus tercapai. Target belanja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan di tunjukan pada tabel berikut.

Tabel II.5 Target Belanja APBD-P Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025

Uraian	Target (Rp)	Persentase
Belanja Operasi		
- Belanja Pegawai	4.359.761.841,00	39,46%
- Belanja Barang dan Jasa	5.914.220.918,00	53,53%
Belanja Modal		
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.142.604,00	2,72%
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	474.882.000,00	4,29%
Jumlah	11.049.007.363,00	100%

(Sumber: DPPA DiskominfoStandi2025)

Berdasarkan data tabel II.5 total dari anggaran sebesar **Rp11.049.007.363,00**, sebagian besar dialokasikan untuk **Belanja Operasi**, yang mencakup **Belanja Pegawai (39,46%)** dan **Belanja Barang dan Jasa (53,53%)**. Hal ini menunjukkan bahwa porsi terbesar anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, termasuk pembayaran gaji pegawai serta pembelian barang dan jasa guna kelancaran aktivitas pemerintahan atau organisasi.

Sementara itu, **Belanja Modal** yang mencakup pengadaan aset dan investasi dalam bentuk peralatan, mesin, gedung, serta aset tetap lainnya memiliki porsi yang lebih kecil, yaitu **hanya 4,29% dari total anggaran**. Dari jumlah ini, **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** memiliki persentase **2,72%**, sedangkan **Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.29%**.

Komposisi belanja ini mencerminkan prioritas utama pada pengeluaran operasional dibandingkan dengan investasi aset jangka panjang. Jika diperlukan penguatan dalam infrastruktur atau pengadaan aset tetap lainnya, porsi Belanja Modal dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan strategis.

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan, dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut.

Tabel II.6 Anggaran per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran Perubahan (Rp)	%	Keterangan
1	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	1.010.532.888,00	9,15	Alokasi cukup signifikan , diarahkan untuk mendukung keterbukaan informasi publik, pengelolaan media, dan peningkatan layanan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	3.713.59.059,00	33,61	Alokasi dominan , mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam penguatan tata kelola pemerintahan digital, pengembangan aplikasi, serta integrasi layanan berbasis elektronik.
3	Meningkatnya kualitas data statistik Sektoral	209.473.613,00	1,90	Alokasi relatif kecil , difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar statistik sektoral, koordinasi data, dan implementasi prinsip Satu Data Indonesia.
4	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.	75.949.187,00	0,69	Alokasi sangat kecil , bersifat pendukung untuk menjaga keamanan informasi dan mitigasi risiko, dengan pendekatan efisiensi anggaran.
5	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Kabupaten / Kota	6.039.692.616,00	54,69	Alokasi sangat dominan , menunjukkan fokus utama anggaran pada peningkatan layanan pemerintahan secara menyeluruh, termasuk dukungan operasional dan pelayanan publik lintas sektor.

(Sumber: DPPA DiskominfoStandi 2026)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.

3.1 Capain Kenierja Tahun 2025

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran. strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Katingan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan Unit Kerja Internal	Nilai Lakip	Angka	70.96	Penilaian untuk 2025 belum rilis masih dalam tahap penyusunan LAKIP		
2.	Meningkatnya Layanan Informasi	Indeks Layanan Informasi Publik	Angka	91.00	91.13	100.14	Sangat Baik
3	Meningkaynya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Angka	3.26	4.04	123.93	Sangat Baik

4	Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Angka	400	407	101.75	Sangat Baik
5	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Baik

Renstra 2024-2026)

Pada tahun 2024, indikator Nilai Lakip tercapai sebesar 101% dari Nilai Lakip Tahun 2023, Indeks Layanan Informasi Publik 100.14%, Indeks SPBE 123.93%, Indeks KAMI 101.75%, dan Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah 100%.

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

N0	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Meningkatnya literasi digital masyarakat dan pemerataan akses TIK di seluruh wilayah Kabupaten Katingan.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Katingan	Skor	41	41.5	101	
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,26	4.04	123.93	
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik digital yang responsif, transparan, dan berbasis data.	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	Skor	-	0	0	Indikator baru ada di tahun 2026
4	Terjaminnya keterbukaan informasi publik yang akurat, mudah diakses, dan tepat waktu oleh masyarakat.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	91.00	91.13	100.14	
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase	100	100	100	
6		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	82	100	121	
7		Persentase desa / kelurahan terlayani akses internet yang baik	Persentase	82	70	85.36	

8	Tersedianya layanan informasi publik yang terbuka, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	Persentase	100	100	100	
9	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100	100	100	
10		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100	100	100	
11	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	Skor	400	407	101.75	
12	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Predikat)	Predikat	70.96	Penilaian untuk 2025 belum rilis masih dalam tahap penyusunan LAKIP		

1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk (setiap indikator sasaran kinerja diuraikan Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan) dikelompokan per sasaran seperti contoh dibawah :

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Satu

Tabel Capaian Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan Unit Kerja Internal	Nilai Lakip	Angka	70.96	Masih proses penilaian	
Capaian sasaran 1						

Analisis Capaian Kinerja

- Nilai SAKIP masih dalam proses penilaian, sehingga belum dapat dievaluasi secara langsung.

3.1.3 Perbandingan Realisasi kinerja dari Tahun 2022 terhadap target Renstra

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 5 tahun terakhir masa Renstra ditunjukan pada Tabel III.3 dan tentang perbandingan capaian indikator sasaran strategis.

Tabel III.3.1.3 Indikator Nilai Lakip

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat capaian (%)
1.	2022	65	66.80	102
2.	2023	68.83	70.95	106
3.	2024	70.96	72.05	101
4.	2025	71.00	0	0
5.	2026	71.20	0	0

Sumber Data Sekretariat

3.1.4 Pembandingan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten katingan Tahun 2025 dengan Kabupaten Katingan.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		Diskominfostandi Kab. Katingan Tahun 2025	Standar Kabupaten Katingan Tahun 2025	Diskominfostandi Kab. Katingan Tahun 2025	Standar Kabupaten Katingan Tahun 2025
1	Nilai LAKIP	70.96	B	Masih Dalam Proses Penilaian	61.13

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

A. Nilai LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Faktor keberhasilan:

- Komitmen Pimpinan: Adanya dukungan kuat dari pimpinan dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja.
- Perencanaan Kinerja yang Baik: Sasaran strategis, indikator kinerja, dan program kerja selaras dengan visi-misi daerah.
- Pemanfaatan Data dan Evaluasi Berkala: Penggunaan data berbasis bukti (evidence-based) dalam pengambilan keputusan dan evaluasi program.
- Penguatan Sistem Pengendalian Internal: Adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan akuntabilitas.
- SDM yang Kompeten: Peningkatan kapasitas ASN dalam menyusun laporan kinerja dan memahami sistem akuntabilitas.

2. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

A. Nilai LAKIP

Faktor penyebab kegagalan atau penurunan:

- Kurangnya Pemahaman tentang Akuntabilitas Kinerja: Beberapa OPD masih menganggap LAKIP sebagai sekadar laporan administratif.
- Perencanaan yang Tidak Tepat Sasaran: Program kerja tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
- Minimnya Evaluasi dan Monitoring: Tidak ada evaluasi yang berkelanjutan sehingga sulit mengukur dampak program.
- Kurangnya SDM yang Kompeten: Masih ada pegawai yang belum memahami mekanisme pengukuran kinerja berbasis hasil.

3. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

A. Meningkatkan Nilai LAKIP

1. Pengukuran Capaian Kinerja supaya menjadi dasar dalam penyesuaian (Pemberian / Pengurangan) Tunjangan Kinerja.
2. Dalam Menyusun LAKIP tahun selanjutnya memuat perbandingan kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / antar OPD 1 (satu) provinsi (Benchmark Kinerja).
3. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan menggunakan teknolog informasi / aplikasi.
4. Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis terkait perencanaan kinerja dan penyusunan LAKIP.
5. Penguatan Evaluasi dan Monitoring: Menerapkan mekanisme evaluasi berkala terhadap pencapaian kinerja OPD.
6. Optimalisasi e-Government: Memanfaatkan sistem digital untuk memudahkan pelaporan dan akuntabilitas.
7. Peningkatan Perencanaan Berbasis Data: Mewajibkan OPD menggunakan indikator kinerja berbasis data dalam setiap programnya.

3.1.5 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Dua

Tabel Capaian Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkaynya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Angka	3.26	4.04	123.93
Capaian sasaran 2						123.93

Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, **Indeks SPBE** pada tahun pelaporan ditargetkan sebesar **3,26** dan terealisasi sebesar **4,04**, sehingga capaian kinerja mencapai **123,93%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target sasaran **tercapai dan melampaui target yang telah ditetapkan**, yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam kualitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintah daerah.

Keberhasilan ini didorong oleh penguatan tata kelola SPBE, peningkatan integrasi aplikasi dan layanan digital, serta optimalisasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, adanya komitmen pimpinan daerah, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, serta penerapan kebijakan dan arsitektur SPBE yang lebih terarah turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai indeks SPBE.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sasaran Strategis 3 menunjukkan **kinerja sangat baik**, sekaligus menggambarkan kemajuan dalam penerapan pemerintahan digital yang efektif, efisien, dan terintegrasi guna mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan.

3.1.6 Perbandingan Realisasi kinerja dari Tahun 2022 terhadap target Renstra

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 5 tahun terakhir masa Renstra ditunjukan pada Tabel III.3 dan tentang perbandingan capaian indikator sasaran strategis.

Tabel III.3.1.6 Indikator Indeks SPBE

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat capaian (%)
1.	2022	2.25	2.25	100
2.	2023	3.02	3.02	100
3.	2024	3.03	3.25	107.26
4.	2025	3.26	4.04	126.93
5.	2026	3.27	0	0

Data Bidang TI

3.1.7 Pembandingan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025 dengan Standar Nasional.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		OPD Tahun 2025	Standar Nasional Tahun 2025	OPD Tahun 2025	Standar Nasional Tahun 2025
1	Indeks SPBE	3.26	2.85	4.04	3.12

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

1. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Indeks SPBE

Keberhasilan peningkatan **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** yang mencapai **123,93%** dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung utama. Salah satu faktor utama adalah **penguatan tata kelola SPBE**, yang ditandai dengan penyusunan dan implementasi kebijakan, pedoman, serta arsitektur SPBE yang lebih terarah dan selaras dengan kebijakan nasional.

Selain itu, **peningkatan integrasi aplikasi dan layanan digital** antar perangkat daerah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai indeks SPBE. Upaya pengurangan aplikasi yang bersifat silo serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi bersama mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik.

Faktor pendukung lainnya adalah **peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi**, termasuk ketersediaan jaringan, pusat data, dan keamanan informasi, yang menunjang keandalan layanan SPBE. Di samping itu, **komitmen pimpinan daerah dan koordinasi lintas perangkat daerah** dalam penerapan SPBE turut mendorong konsistensi implementasi kebijakan dan program SPBE.

Secara keseluruhan, sinergi antara kebijakan, infrastruktur, aplikasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi penyebab utama keberhasilan dan peningkatan kinerja Indeks SPBE pada tahun pelaporan.

2. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

- Meskipun capaian **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** telah melampaui target, masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan kegagalan atau penurunan kinerja apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Salah satu faktor utama adalah **belum optimalnya pemerataan pemahaman dan implementasi kebijakan SPBE di seluruh perangkat daerah**, sehingga kualitas penerapan SPBE masih berpotensi tidak seragam.
- Selain itu, **ketergantungan terhadap kesiapan infrastruktur dan sistem teknologi informasi** menjadi risiko tersendiri, khususnya terkait dengan keterbatasan anggaran pemeliharaan, gangguan jaringan, maupun kebutuhan peningkatan kapasitas pusat data. Apabila tidak diantisipasi, kondisi ini dapat mempengaruhi keandalan layanan SPBE.
- Faktor lainnya adalah **keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis SPBE**, baik dari sisi pengelolaan aplikasi, keamanan informasi, maupun integrasi sistem. Tingginya dinamika regulasi dan standar nasional SPBE juga menuntut penyesuaian yang cepat, yang apabila tidak

- diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan koordinasi, berpotensi menurunkan capaian kinerja.
- Dengan demikian, tanpa penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, serta pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan, terdapat risiko terjadinya penurunan kinerja Indeks SPBE di masa mendatang.

3. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam rangka menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, perangkat daerah telah melaksanakan berbagai langkah perbaikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah **penguatan tata kelola SPBE**, melalui penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, pedoman, serta standar operasional prosedur yang mengacu pada kebijakan SPBE nasional.

Selain itu, dilakukan **optimalisasi dan integrasi aplikasi pemerintahan**, dengan mendorong penggunaan aplikasi bersama dan mengurangi aplikasi yang bersifat parsial atau tumpang tindih antar perangkat daerah. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta interoperabilitas layanan SPBE.

Perangkat daerah juga melakukan **peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi**, termasuk jaringan, pusat data, serta sistem pendukung keamanan informasi, guna menjamin keandalan layanan SPBE. Di sisi lain, **peningkatan kapasitas sumber daya manusia** dilaksanakan melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan teknis terkait pengelolaan SPBE.

Selain itu, dilakukan **penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi SPBE** secara berkala antar perangkat daerah untuk memastikan kesesuaian implementasi dengan kebijakan dan target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut menjadi alternatif solusi yang telah dilakukan dalam mengantisipasi potensi penurunan kinerja dan mendukung peningkatan Indeks SPBE secara berkelanjutan.

3.1.8 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Ketiga

Tabel Capaian Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya Layanan Informasi	Indeks Layanan Informasi Publik	Angka	91.00	91.13	100.14
Capaian sasaran 3						100.14

Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, **Indeks Layanan Informasi Publik** pada tahun pelaporan ditargetkan sebesar **91,00** dan terealisasi **91,13**, sehingga capaian kinerja mencapai **100,14%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target sasaran **telah tercapai dan melampaui target yang ditetapkan**.

Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh meningkatnya kualitas pengelolaan informasi publik, antara lain melalui optimalisasi pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), peningkatan keterbukaan informasi publik, serta pemanfaatan media komunikasi pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Selain itu, responsivitas terhadap permohonan informasi publik dan penyampaian informasi yang akurat

serta tepat waktu turut berkontribusi terhadap peningkatan indeks layanan informasi publik.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sasaran Strategis 2 mencerminkan **kinerja yang sangat baik** dan menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

3.1.9 Perbandingan Realisasi kinerja dari Tahun 2022 terhadap target Renstra

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 5 tahun terakhir masa Renstra ditunjukan pada Tabel III.3 dan tentang perbandingan capaian indikator sasaran strategis.

Tabel 3.1.6 Indikator Indeks Keterbukaan Publik

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat capaian (%)
1.	2022	78.94	74.69	94.61
2.	2023	83.36	80.15	96.14
3.	2024	80.90	90.00	111
4.	2025	91.00	91.13	100.14
5.	2026	91.15	0	0

Sumber Data Bidang PIP

3.1.10 Pembedingan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025 dengan Standar Kota Palangka Raya.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		Diskominfostandi Kab. Katingan Tahun 2025	Standar Kota Palangka Raya Tahun 2025	Diskominfostandi Kab. Katingan Tahun 2025	Standar Kota Palangka Raya Tahun 2025
1	Indeks Keterbukaan Publik	91.00	95.00	91.13	94.29

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

1. *Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Indeks Layanan Informasi Publik*

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis *Meningkatnya Layanan Informasi* yang mencapai **100,14%** dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung utama :

Pertama, semakin optimalnya peran **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** dalam mengelola, menyediakan, dan melayani permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kualitas layanan informasi yang diterima oleh masyarakat.

Kedua, adanya peningkatan **koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah** dalam penyediaan data dan informasi publik yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung keterbukaan informasi publik secara menyeluruh. Ketiga, pemanfaatan **media komunikasi dan kanal digital pemerintah daerah** yang semakin optimal turut memperluas jangkauan diseminasi informasi publik kepada masyarakat.

Selain itu, dukungan kebijakan pimpinan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola layanan informasi juga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja, khususnya dalam hal ketepatan waktu, kejelasan informasi, dan responsivitas pelayanan. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama tercapainya bahkan terlampauinya target kinerja layanan informasi publik.

2. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

Meskipun capaian Sasaran Strategis *Meningkatnya Layanan Informasi* telah mencapai target, masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan kegagalan atau penurunan kinerja apabila tidak diantisipasi. Salah satu faktor utama adalah **belum meratanya pemahaman dan kapasitas pengelola layanan informasi publik di seluruh perangkat daerah**, yang dapat berdampak pada kualitas dan konsistensi penyediaan informasi. Selain itu, **keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi**, khususnya pada pengelolaan sistem dan kanal digital, berpotensi menghambat kecepatan dan kualitas pelayanan informasi publik.

Faktor lainnya adalah **ketergantungan pada koordinasi lintas perangkat daerah**, di mana keterlambatan penyampaian data dan informasi dari OPD teknis dapat mempengaruhi ketepatan waktu publikasi informasi kepada masyarakat. Perubahan regulasi, dinamika kebutuhan informasi publik yang semakin kompleks, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap keterbukaan dan kecepatan layanan juga menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan capaian kinerja. Oleh karena itu, tanpa penguatan sistem, sumber daya manusia, dan koordinasi, terdapat risiko terjadinya penurunan kinerja layanan informasi publik di masa mendatang.

3. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam rangka mengantisipasi potensi kegagalan atau penurunan kinerja pada Sasaran Strategis *Meningkatnya Layanan Informasi*, perangkat daerah telah melakukan berbagai langkah perbaikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah **penguatan peran dan fungsi PPID**, melalui peningkatan koordinasi, pembinaan, serta pendampingan kepada PPID Pelaksana di seluruh perangkat daerah guna memastikan keseragaman standar layanan informasi publik.

Selain itu, dilakukan **optimalisasi pemanfaatan media dan kanal komunikasi publik**, baik melalui website resmi, media sosial, maupun media publikasi lainnya, agar informasi pemerintah daerah dapat diakses secara lebih cepat, luas, dan transparan oleh masyarakat. Perangkat daerah juga melakukan **peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi**, termasuk pembaruan konten secara berkala serta pengendalian kualitas informasi sebelum dipublikasikan.

Upaya lainnya adalah **peningkatan kapasitas sumber daya manusia**, melalui bimbingan teknis dan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik dan tata kelola layanan informasi. Di samping itu, perangkat daerah memperkuat **koordinasi lintas sektor** untuk mempercepat penyampaian data dan informasi dari perangkat daerah teknis, sehingga mendukung ketepatan waktu dan kualitas layanan informasi publik.

3.1.11 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Empat

Tabel Capaian Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Kominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	80.00	70.00	87.50
Capaian sasaran 4						87.50

Analisis Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Kominfo” yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan capaian sebesar **87,50 persen**, dengan realisasi **70,00 persen** dari target **80,00 persen**. Capaian tersebut menggambarkan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan telah berjalan, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih perlunya peningkatan konsistensi kualitas pelayanan, optimalisasi sarana dan prasarana, serta penguatan kompetensi dan responsivitas petugas layanan. Ke depan, peningkatan kualitas layanan akan terus dilakukan melalui penyempurnaan standar pelayanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan mekanisme pengelolaan pengaduan dan umpan balik masyarakat.

3.1.12 Perbandingan Realisasi kinerja dari Tahun 2022 terhadap target Renstra

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 5 tahun terakhir masa Renstra ditunjukkan pada Tabel III.3 dan tentang perbandingan capaian indikator sasaran strategis.

Tabel III.4.5 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat capaian (%)
1.	2022	TAD (Indikator tidak ada karena belum menjadi indikator pada tahun berkenaan)		
2.	2023	TAD (Indikator tidak ada karena belum menjadi indikator pada tahun berkenaan)		
3.	2024	TAD (Indikator tidak ada karena belum menjadi indikator pada tahun berkenaan)		
4.	2025	80.00	70.00	87.50
5.	2026	100	0	0

S

Sumber Data PKP dan PIP

3.1.13 Pembandingan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025 dengan Kota Palangka Raya.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		Diskominfostandi Kab. Katingan Tahun 2025	Standar Kota Palangka Raya Tahun 2025	Diskominfostandi Kab. Katingan Tahun 2025	Standar Kota Palangka Raya Tahun 2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.00	80.00	70.00	81.24

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

1. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Peningkatan kinerja pada sasaran “*Meningkatnya Kualitas Layanan Kominfo*” didukung oleh adanya komitmen pimpinan dalam peningkatan mutu layanan publik, penerapan standar pelayanan sebagai acuan pemberian layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat. Selain itu, upaya peningkatan koordinasi internal dan peningkatan kesadaran petugas layanan terhadap pentingnya kepuasan masyarakat turut memberikan kontribusi positif terhadap capaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

Belum tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat disebabkan oleh masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan, belum meratanya kualitas pelayanan pada seluruh jenis layanan, serta perlunya peningkatan kompetensi dan responsivitas petugas layanan dalam menangani kebutuhan dan pengaduan masyarakat. Di samping itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme layanan juga masih bervariasi sehingga memengaruhi persepsi kepuasan terhadap layanan yang diberikan.

3. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sebagai upaya perbaikan, Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan penyempurnaan standar pelayanan, meningkatkan pemanfaatan layanan berbasis elektronik, serta memperkuat mekanisme penanganan pengaduan dan umpan balik masyarakat. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan pendampingan petugas layanan, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung layanan guna meningkatkan kualitas dan konsistensi pelayanan kepada masyarakat.

3.1.14 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Lima

Tabel Capaian Sasaran 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
5	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase	100	100	100
Capaian sasaran 5						100

Analisis Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Layanan Informasi Publik” yang diukur melalui indikator Persentase Penyebarluasan Informasi Melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mencapai **100 persen**, sesuai dengan target yang ditetapkan. Seluruh informasi publik telah disebarluaskan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Capaian ini menunjukkan pengelolaan informasi publik telah berjalan optimal dan mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kinerja pada sasaran ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitas serta konsistensinya pada periode selanjutnya.

3.1.15 Perbandingan Realisasi kinerja dari Tahun 2022 terhadap target Renstra

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 5 tahun terakhir masa Renstra ditunjukkan pada Tabel III.3 dan tentang perbandingan capaian indikator sasaran strategis

Tabel III.3 Indikator

Persentase Penyebarluasan Informasi Melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat capaian (%)
1.	2022	100	100	100
2.	2023	100	100	100
3.	2024	100	100	100
4.	2025	100	100	100
5.	2026	100	0	0

Sumber Data PKP

3.1.13 Pembandingan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025 dengan Standar Nasional.

Pada indikator **Persentase Penyebarluasan Informasi Melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**, realisasi kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025 mencapai **100 persen**. Capaian ini telah **memenuhi standar nasional keterbukaan informasi publik**, yaitu terpenuhinya kewajiban penyampaian informasi publik melalui kanal resmi pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kinerja pada indikator ini dinilai **sangat baik** dan sejalan dengan standar nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

1. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Persentase Penyebarluasan Informasi Melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, optimalisasi pengelolaan kanal informasi resmi pemerintah daerah, serta koordinasi yang efektif antar unit kerja dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan media komunikasi publik secara konsisten turut memastikan seluruh informasi publik dapat disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

2. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

Pada tahun pelaporan tidak terdapat kegagalan atau penurunan kinerja yang signifikan, karena seluruh target penyebarluasan informasi publik telah tercapai. Namun demikian, potensi kendala yang perlu diantisipasi ke depan antara lain dinamika kebutuhan informasi masyarakat yang semakin cepat, perubahan regulasi, serta risiko keterbatasan sumber daya dalam menjaga konsistensi kualitas informasi.

3. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sebagai langkah penguatan, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian telah melakukan standarisasi pengelolaan informasi publik, peningkatan koordinasi dan pengendalian internal, serta optimalisasi pemanfaatan berbagai media komunikasi publik. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja dan meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi publik pada periode selanjutnya.

3.1.15 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Enam

Tabel Capaian Sasaran 6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100%	100%	100%
Capaian sasaran 6						100

Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator **Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah** ditargetkan sebesar **100%** dan terealisasi **100%**, sehingga capaian kinerja mencapai **100%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah telah memanfaatkan data statistik sektoral sebagai dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan pencapaian ini mencerminkan semakin baiknya kualitas tata kelola data statistik sektoral, khususnya dalam hal ketersediaan, keterpaduan, dan pemanfaatan data oleh perangkat daerah. Dukungan koordinasi antar perangkat daerah, penerapan kebijakan Satu Data Indonesia, serta peningkatan kesadaran OPD terhadap pentingnya data statistik yang valid dan terstandar turut berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja tersebut.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sasaran Strategis 5 menunjukkan **kinerja yang baik dan optimal**, serta menjadi fondasi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.1.16 Perbandingan Realisasi kinerja dari Tahun 2022 terhadap target Renstra

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 5 tahun terakhir masa Renstra ditunjukkan pada Tabel III.3 dan tentang perbandingan capaian indikator sasaran strategis

Tabel III.3 Indikator

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat capaian (%)
1.	2022	100	100	100
2.	2023	100	100	100
3.	2024	100	100	100
4.	2025	100	100	100
5.	2026	100	0	0

Sumber Data Standi

3.1.14 Pembandingan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025 dengan Standar Nasional.

Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan melaporkan bahwa 100% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Secara nasional, tidak terdapat standar baku yang menetapkan persentase minimum OPD yang harus menggunakan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, beberapa daerah telah mencapai tingkat penggunaan data statistik yang tinggi. Misalnya, Kota Semarang melaporkan bahwa 100% OPD-nya menggunakan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

- 1. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan**

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis *Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral* yang mencapai **100%** dipengaruhi oleh meningkatnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam **memanfaatkan data statistik sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah**. Implementasi kebijakan **Satu Data Indonesia** di lingkungan pemerintah daerah telah mendorong keseragaman data, standar metadata, serta kejelasan sumber data yang digunakan oleh OPD.

Selain itu, terjalinnya **koordinasi yang baik antara perangkat daerah dengan wali data dan pembina data** turut mendukung ketersediaan data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meningkatnya kesadaran OPD terhadap pentingnya data berkualitas dalam penyusunan dokumen perencanaan juga menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pencapaian kinerja ini.

2. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

- Meskipun capaian kinerja telah mencapai target maksimal, masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan kegagalan atau penurunan kinerja di masa mendatang. Salah satunya adalah **belum meratanya kapasitas pengelolaan data statistik di seluruh OPD**, baik dari sisi sumber daya manusia maupun pemahaman terhadap standar data statistik sektoral.
- Selain itu, **ketergantungan pada konsistensi pembaruan data** dan kualitas input data dari OPD teknis menjadi tantangan tersendiri. Apabila tidak dilakukan pemutakhiran data secara berkala atau pengendalian kualitas data yang memadai, maka validitas dan relevansi data statistik sektoral dapat menurun dan berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan daerah.

3. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam rangka menjaga keberlanjutan capaian kinerja dan meningkatkan kualitas data statistik sektoral, perangkat daerah telah melakukan beberapa langkah perbaikan. Upaya yang dilakukan antara lain **penguatan koordinasi dan pembinaan kepada OPD** dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Selain itu, dilakukan **peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data**, melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait pengelolaan, validasi, serta pemanfaatan data statistik. Perangkat daerah juga melaksanakan **pemantauan dan evaluasi pemanfaatan data statistik** dalam dokumen perencanaan guna memastikan data yang digunakan tetap akurat, mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

3.1.16 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Tujuh

Tabel Capaian Sasaran 7

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
7	Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Angka	400	407	101.75
Capaian sasaran 7						101.75

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, **Indeks Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** pada tahun pelaporan ditargetkan sebesar **400** dan terealisasi sebesar **407**, sehingga capaian kinerja mencapai **101,75%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target sasaran **telah tercapai dan melampaui target yang ditetapkan**, yang mencerminkan meningkatnya tingkat kematangan dan penerapan pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh penerapan kebijakan dan pengendalian keamanan informasi yang lebih baik, termasuk peningkatan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya perlindungan data dan informasi, serta penguatan pengelolaan risiko keamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE. Selain itu, adanya upaya perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola keamanan informasi turut berkontribusi pada peningkatan nilai indeks. Secara keseluruhan, capaian kinerja Sasaran Strategis 4 menunjukkan **kinerja yang sangat baik** dan memberikan dukungan yang kuat terhadap keandalan, keamanan, dan keberlanjutan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di pemerintah daerah.

3.1.12 Perbandingan Realisasi kinerja dari Tahun 2022 terhadap target Renstra

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 5 tahun terakhir masa Renstra ditunjukan pada Tabel III.3 dan tentang perbandingan capaian indikator sasaran strategis.

Tabel III.4.5 Indikator Indeks KAMI

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat capaian (%)
1.	2022	TAD (Indikator tidak ada karena belum menjadi indikator pada tahun berkenaan)		
2.	2023	TAD (Indikator tidak ada karena belum menjadi indikator pada tahun berkenaan)		
3.	2024	250	347	138
4.	2025	400	407	101.75
5.	2026	450	0	0

Sumber Data Standi

3.1.13 Pembandingan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025 dengan Kota Palangka Raya.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		Diskominfostandi Kab. Katingan Tahun 2025	Standar Kota Palangka Raya Tahun 2025	Diskominfostandi Kab. Katingan Tahun 2025	Standar Kota Palangka Raya Tahun 2025
1	Indeks KAMI	400	380	401	407

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

1. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Indeks KAMI

Keberhasilan pencapaian **Indeks Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** yang mencapai **101,75%** dipengaruhi oleh meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam menerapkan pengamanan informasi sebagai bagian integral dari penyelenggaraan SPBE. Penerapan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang lebih terstruktur telah mendorong peningkatan tingkat kepatuhan terhadap standar keamanan informasi.

Selain itu, meningkatnya kesadaran dan pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya perlindungan data dan informasi pemerintah turut berkontribusi pada perbaikan pengelolaan risiko keamanan informasi. Upaya identifikasi, pengendalian, dan mitigasi risiko keamanan informasi yang dilakukan secara bertahap juga menjadi faktor pendukung peningkatan nilai indeks

2. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan kegagalan atau penurunan kinerja di masa mendatang. Salah satunya adalah **belum meratanya tingkat kematangan penerapan keamanan informasi di seluruh perangkat daerah**, baik dari sisi kebijakan, proses, maupun teknis.

Selain itu, **keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang keamanan informasi** serta ketergantungan pada infrastruktur teknologi informasi yang terus berkembang dapat menjadi risiko apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan. Dinamika ancaman siber yang semakin kompleks juga menuntut penyesuaian dan penguatan pengamanan secara terus-menerus.

3. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan capaian kinerja keamanan informasi, perangkat daerah telah melakukan beberapa langkah perbaikan. Upaya yang dilakukan antara lain **penguatan kebijakan dan tata kelola keamanan informasi**, termasuk penyusunan dan penyempurnaan pedoman serta prosedur pengamanan informasi yang selaras dengan kebijakan SPBE.

Selain itu, dilakukan **peningkatan koordinasi dan pendampingan kepada perangkat daerah** dalam penerapan pengendalian keamanan informasi, serta **peningkatan kapasitas sumber daya manusia** melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terkait keamanan informasi. Perangkat daerah juga melakukan **pemantauan dan evaluasi secara berkala** terhadap penerapan keamanan informasi guna memastikan pengendalian berjalan efektif dan berkelanjutan.

3.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Khusus Setiap Sasaran, Indikator dan Program)

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui cost per outcome atau biaya/anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja serta menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang ditetapkan telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran dengan persentase realisasi anggaran dalam tiap Sasaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran mencapai 100% atau lebih, dan persentase realisasi anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran kurang dari 100%, dan/atau persentase realisasi anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut.

Table III.11 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Program	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LAKIP	Masih Dalam Proses Penilaian	95.20	100 (Efisien)
3	Meningkatnya Layanan Informasi	Indeks Layanan Komunikasi Publik	100.14	96.59	96.45 (Efisien)
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	123.93	99	79.87 (Tidak Efisien)
5	Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Indek KAMI	101.75	98.21	71.17 (Tidak Efisien)
6	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	99	97.30 (Efisien)

Upaya Efisiensi yang Dilakukan Selama Tahun 2025

Selama tahun 2025, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan telah melakukan berbagai upaya efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain melalui perencanaan anggaran yang lebih terarah dan berbasis kinerja, penguatan koordinasi antarbidang, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu, dilakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang ditetapkan. Upaya efisiensi juga diwujudkan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia secara optimal serta pengurangan kegiatan yang bersifat administratif dan kurang berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis.

Optimalisasi Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Pemanfaatan sumber daya selama tahun 2025 dinilai **cukup optimal**, tercermin dari capaian kinerja sebagian besar indikator program yang mencapai atau melampaui target dengan tingkat penyerapan anggaran yang proporsional. Sumber daya manusia dimanfaatkan secara efektif melalui pembagian tugas yang jelas sesuai kompetensi serta peningkatan kapasitas aparatur dalam mendukung pelaksanaan program. Sumber daya anggaran diarahkan pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja, sementara pemanfaatan teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja. Dengan pendekatan tersebut, penggunaan sumber daya mampu mendukung pencapaian target kinerja secara optimal dan berkelanjutan.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (Khusus setiap sasaran, Indikator Sasaran dan Program)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel III.12 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

NO.	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	% Penyerapan Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LAKIP	Masih Dalam Proses Penilaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai LAKIP	70.96	Masih Dalam Proses Penilaian	Masih Dalam Proses Penilaian	95.20
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100	98
				Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100	100	100	97
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Kebutuhan	100	100	100	100
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Internal Memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	95
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase unit kerja internal memperoleh Pengadaan barang milik daerah untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja Internal Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	92
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Saranan dan Prasarana Barang Milik Daerah	100	100	100	97
B	Meningkatnya Layanan Informasi	Indeks Layanan Komunikasi Publik	100.14	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	100	100	100	96.59

NO.	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	% Penyerapan Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	97
C	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	123.93	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	99
				<i>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Aplikasi Umum SPBE yang digunakan Pemda	80	80	100	98
D	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pembangunan daerah	100	100	100	98
				<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pembangunan daerah	100	100	100	98
E	Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<i>Indeks KAMI</i>	101.75	<i>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</i>	<i>Indeks KAMI</i>	400	407	101.75	97
				<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Indeks KAMI</i>	400	407	101.75	98

Berdasarkan evaluasi kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada Tabel III.12, terdapat beberapa program yang dinilai paling berdampak (high impact) karena memiliki capaian kinerja melampaui target Renstra, keterkaitan langsung antara output kegiatan dengan indikator sasaran strategis, serta didukung oleh tingkat penyerapan anggaran yang optimal.

1. Program Aplikasi Informatika

Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan SPBE
Indikator Utama: Indeks SPBE
Capaian: 123,93%
Penyerapan Anggaran: 98–99%

Alasan sebagai High Impact Program:

- Memberikan kontribusi langsung dan signifikan terhadap peningkatan Indeks SPBE yang jauh melampaui target Renstra.
- Output kegiatan berupa integrasi aplikasi dan layanan publik berbasis elektronik secara langsung mempengaruhi nilai indeks nasional SPBE.
- Menunjukkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dengan capaian kinerja 100% dan serapan anggaran tinggi.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Informasi

Indikator Utama: Indeks Layanan Komunikasi Publik

Capaian: 100,14%

Penyerapan Anggaran: 96–97%

Alasan sebagai High Impact Program:

- Berdampak langsung terhadap peningkatan keterbukaan informasi publik dan pemahaman masyarakat atas kebijakan pemerintah daerah.
- Indikator kegiatan bersifat *outcome oriented* dan selaras dengan indikator sasaran Renstra.
- Pelaksanaan program mendukung pemenuhan standar layanan informasi publik dan akuntabilitas pemerintah daerah.

3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Sasaran Strategis: Meningkatnya Keamanan Informasi

Indikator Utama: Indeks KAMI

Capaian: 101,75%

Penyerapan Anggaran: 97–98%

Alasan sebagai High Impact Program:

- Berkontribusi signifikan dalam mendukung keandalan dan keamanan penyelenggaraan SPBE.
- Output kegiatan berpengaruh langsung terhadap peningkatan tingkat kematangan keamanan informasi pemerintah daerah.
- Menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan layanan digital pemerintah daerah.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral

Indikator Utama: Persentase OPD yang menggunakan data statistik

Capaian: 100%

Penyerapan Anggaran: 98%

Alasan sebagai High Impact Program:

- Mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis data secara menyeluruh.
- Output program sepenuhnya selaras dengan indikator sasaran dan kebijakan Satu Data Indonesia.
- Memberikan dampak sistemik terhadap kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Program-program tersebut dikategorikan sebagai High Impact Program karena:

1. Capaian indikator melampaui atau memenuhi target Renstra.
2. Output kegiatan memiliki keterkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis.
3. Realisasi anggaran optimal dan efisien, tanpa deviasi signifikan.
4. Memberikan dampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan transformasi digital.

3.2.7 Dukungan Inovasi Dalam Pencapaian Kinerja

1. Pembentukan dan Pengembangan Desa Digital

Sebagai sebuah unit terkecil yang ada di pemerintahan, desa akan mendukung terciptanya kota pintar atau smart city. Desa digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi. Tahun 2023, telah dibentuk 3 desa sebagai Pilot Project Desa Digital di Kabupaten Katingan, yaitu :

1. Desa Tewang Manyangen, Kecamatan Tewang Sangalang Garing
2. Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan
3. Desa Karuing, Kecamatan Kamipang.

Tahun 2025, akan dilanjutkan dengan pembentukan desa-desa digital lainnya di Kabupaten Katingan untuk mempercepat transformasi digital di tingkat desa, dan pengembangan desa-desa digital yang dibentuk tahun 2023.

Program Kerja Pilot Project Desa Digital bekerjasama dengan Tim Fak Teknik, Jurusan Teknik Informatika Universitas Palangka Raya, antara lain :

1. Penyediaan infrastruktur jaringan internet melalui kabel *Fiber Optik* (FO) dan modem orbit telkomsel, termasuk pembayaran bandwidth internet selama setahun untuk *wifi* gratis di kantor desa dan ruang terbuka publik.
2. Penyediaan *Command Centre* sebagai ruang monitor layanan CCTV pada desa
3. Penyediaan layanan administrasi desa berbasis online dan website desa melalui aplikasi SIDEKA-NG (Sistem Informasi Desa dan *Kawasan-New Generation*)
4. Peningkatan kualitas SDM desa di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pelatihan dan sosialisasi :
 - a. Pembuatan konten *creator* di media sosial dan penulisan berita untuk website desa
 - b. Pelatihan videografi dan fotografi menggunakan smartphone
 - c. Pelatihan Desain grafis untuk pembuatan desain cinderamata (kaos, tote bag, mug dll) khas desa
 - d. Pelatihan penggunaan aplikasi belanja online (Tokopedia dan Shopee)
 - e. Pelatihan meningkatkan branding produk UMKM: desain logo dan kemasan yang menarik
 - f. Pelatihan membuat media pembelajaran dan media mengajar bagi guru (MS Power point, Canva, Google Classroom)

- g. Pelatihan MS Excel (membuat RAB) bagi perangkat desa
- h. Sosialisasi Aplikasi CCTV, Aplikasi LAPOR, internet sehat bagi siswa SD – SMP – SMA, pencegahan penyebaran HOAKS dan ujaran kebencian, undang-undang ITE

2. Komunitas IT (Teknologi dan Informasi) Pelajar dan Mahasiswa

Dalam mewujudkan Katingan sebagai "Smart City", pengembangan SDM juga menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. Diskominfostandi akan bekerjasama dengan pihak sekolah (SMP dan SMA/SMK) dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Katingan membentuk komunitas-komunitas IT yang beranggotakan pelajar SMP, SMA/SMK dan Mahasiswa yang memiliki minat dan bakat dalam IT. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam mendukung Program KLA (Kabupaten Layak Anak) di Kabupaten Katingan.

Program Kerja Komunitas IT sebagai berikut :

1. Pembangunan website khusus komunitas IT sebagai wadah informasi, berbagi (*share*) terkait IT, dan kegiatan vicon.
2. Pendampingan pemberian materi dan workshop IT akan dilaksanakan minimal 1 kali dalam sebulan.
3. Kompetisi tahunan dengan tema berbeda, meliputi majalah digital, animasi digital, game digital, animation motion capture dance team, *Cyber Defense Competition* (CDC), robotika junior, robotika senior, teknologi inovasi dan kreasi.
4. Mengikuti kompetisi IT di tingkat Provinsi dan Nasional.

Kegiatan ini juga sebagai inkubasi untuk menjaring siswa-siswi dan mahasiswa bertalenta di bidang IT. Ke depan, pihak Diskominfostandi akan menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan penempatan kerja. Peserta nantinya akan diseleksi selama tiga bulan melalui pelatihan.

3. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi / Sistem Informasi Terpadu

a. Penyediaan Tenaga Ahli Teknologi Informasi (IT)

Tahun 2023, telah tersedia :

- 2 (dua) orang Tenaga Ahli Web Programmer yang bertugas membangun dan mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Katingan di Kab. Katingan, dan
- 1 (satu) orang Tenaga Ahli *Infrastructure and Data Support* yang bertugas dalam konfigurasi server untuk aplikasi website, desktop serta mobile, pemeliharaan server (backup, manajemen server) dan keamanan aplikasi-aplikasi pada Pusat Data Daerah dan Nasional ,serta membantu infrastruktur jaringan *Local Area Network* (LAN) yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Katingan.

Penyediaan Tenaga Ahli IT ini berdasarkan hasil seleksi kontes yang dilaksanakan di tahun 2022, tim juri dari STMIK dan UPR, dilaksanakan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes tahun 2021. Tahun 2025 akan dilaksanakan kembali kontes perekrutan Tenaga Ahli IT yang baru.

- b. Bekerjasama dengan Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika Universitas Palangka Raya dalam Program Merdeka Belajar, berupa penempatan mahasiswa magang di Diskominfostandi dalam membantu pembangunan dan pengembangan aplikasi.

3.2.8 Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja dan Peran OPD dalam Pencapaian Sasaran

3.2.8.1 Kolaborasi Lintas Sektor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan inisiatif strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Katingan memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan implementasi SPBE dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan Kolaborasi

1. **Meningkatkan Integrasi Layanan Digital Pemerintah Daerah**
 - o Menyelaraskan sistem dan aplikasi yang digunakan oleh berbagai OPD agar lebih efisien dan terhubung dalam satu ekosistem digital.
2. **Meningkatkan Keamanan dan Keandalan Infrastruktur Teknologi**
 - o Menjamin keamanan data dan komunikasi elektronik di lingkungan pemerintahan melalui penguatan sistem persandian dan perlindungan siber.
3. **Mempercepat Transformasi Digital di Seluruh Sektor Pemerintahan**
 - o Mengadopsi teknologi digital dalam pelayanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan.

Bentuk Kolaborasi dengan OPD Lain

1. Dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

- Penyelarasan rencana strategis SPBE dengan visi pembangunan daerah.
- Integrasi data statistik untuk mendukung perencanaan berbasis data.

2. Dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

- Pengembangan sistem pelayanan kependudukan berbasis digital.
- Integrasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya.

3. Dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

- Penerapan sistem manajemen kepegawaian berbasis elektronik (e-Kinerja, e-Absensi).
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan digitalisasi layanan pemerintahan.

4. Dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial

- Digitalisasi layanan kesehatan dan bantuan sosial berbasis data yang akurat dan real-time.
- Penguatan sistem informasi kesehatan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

5. Dengan Dinas Pendidikan

- Implementasi sistem pendidikan berbasis elektronik seperti e-Learning dan digitalisasi administrasi sekolah.
- Penyediaan infrastruktur jaringan internet untuk sekolah-sekolah di wilayah terpencil.

6. Dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

- Integrasi sistem keuangan daerah berbasis elektronik (e-Budgeting, e-Planning, e-Reporting).
- Penguatan tata kelola aset daerah dengan sistem informasi berbasis digital.

7. Dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan infrastruktur daerah.
- Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi proyek pembangunan secara digital.

3.2.8.1 Kolaborasi Lintas Sektor Satu Data Indonesia (SDI)

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses oleh berbagai instansi serta masyarakat. Implementasi SDI di Kabupaten Katingan memerlukan kolaborasi lintas sektor antara **Diskominfo** sebagai wali data dengan berbagai **Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** sebagai produsen dan pengguna data.

Tujuan Kolaborasi

1. **Meningkatkan Kualitas Data Pemerintah Daerah**
 - Memastikan data yang dihasilkan OPD sesuai dengan standar data, metadata, dan interoperabilitas yang ditetapkan dalam SDI.
2. **Mendukung Pengambilan Kebijakan Berbasis Data**
 - Menyediakan data yang valid dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
3. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Data Publik**
 - Mempermudah akses data bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Peran dan Kolaborasi Diskominfo dengan OPD Lain dalam SDI

1. Sebagai Wali Data (Diskominfo Kabupaten Katingan)

- Mengoordinasikan pengelolaan dan pertukaran data antar-OPD.
- Menyediakan infrastruktur data seperti portal Satu Data Kabupaten Katingan.
- Menjamin keamanan dan integritas data pemerintah daerah.

2. Sebagai Produsen Data (OPD terkait)

- Menghasilkan dan memperbarui data sektoral sesuai standar SDI.
- Menyediakan metadata yang sesuai dengan prinsip interoperabilitas data.

3. Sebagai Pengguna Data (Seluruh OPD, Akademisi, Masyarakat, dan Sektor Swasta)

- Menggunakan data dari portal SDI untuk keperluan perencanaan, penelitian, dan layanan publik.
- Memberikan masukan dalam pengembangan sistem data daerah.

Kolaborasi dengan OPD Terkait

OPD	Bentuk Kolaborasi dalam SDI
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Menggunakan data SDI untuk perencanaan pembangunan berbasis data. Memastikan keselarasan data sektoral dengan RPJMD dan RKPD.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	Menyediakan data kependudukan yang valid dan dapat diakses oleh OPD lain secara terbatas sesuai regulasi.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)	Menyediakan data ASN untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan SDM daerah.
Dinas Kesehatan	Menyediakan data kesehatan seperti jumlah fasilitas kesehatan, angka kematian, dan cakupan imunisasi.
Dinas Pendidikan	Mengintegrasikan data pendidikan seperti jumlah sekolah, siswa, guru, dan capaian pendidikan.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Mengelola data keuangan daerah, anggaran, dan aset daerah untuk transparansi fiskal.
Dinas Sosial	Menyediakan data penerima bantuan sosial untuk memastikan ketepatan sasaran program kesejahteraan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	Menyediakan data infrastruktur daerah seperti jalan, irigasi, dan bangunan pemerintah.
Dinas Pariwisata	Mengelola data objek wisata, jumlah kunjungan wisatawan, dan sektor ekonomi kreatif.

Strategi Implementasi Kolaborasi SDI

- Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Daerah**
 - Menetapkan Peraturan Bupati atau Surat Keputusan terkait tata kelola data di Kabupaten Katingan.
- Penguatan Infrastruktur Teknologi**
 - Mengembangkan **Portal Satu Data Kabupaten Katingan** sebagai pusat akses data terbuka bagi OPD dan masyarakat.
- Peningkatan Kapasitas SDM**
 - Melakukan pelatihan bagi pengelola data di setiap OPD agar memahami standar SDI.
- Interoperabilitas dan Integrasi Data**
 - Menyelaraskan sistem informasi yang digunakan OPD agar dapat saling bertukar data secara otomatis.
- Monitoring dan Evaluasi**
 - Melakukan evaluasi rutin terhadap kualitas dan pemanfaatan data oleh OPD serta pemangku kepentingan lainnya.

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DPPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan tahun Anggaran 2025 setelah Perubahan Anggaran Pagu Belanja Langsung sebesar **Rp. 11.049.007.363,-** (Sebelas Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dan **realisasi keuangan** sebesar **Rp. 10.656.493.044,-** (Sepuluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) atau **96.45 %** dan **Realisasi Kinerja Fisik sebesar 100.45%** dengan rincian belanja sebagai berikut:

REALISASI PENDAPATAN

Berdasarkan DPPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan tahun Anggaran 2025 setelah Perubahan Anggaran Pagu Pendapatan sebesar **Rp. 8.500.000,-** (Delan Juta Lima Ratus Rupiah) dan **realisasi pendapatan** sebesar **Rp. 13.300.000,-**(Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu) atau **156 %** dan **Realisasi Kinerja Fisik sebesar 100%** dengan rincian belanja sebagai berikut:

- a. Target Rincian Belanja

i. Belanja Operasi : Rp. 10.273.982.759

ii. Belanja Modal : Rp. 775.024.604
2. Realisasi Belanja

a. Belanja Operasi : Rp. 9.884.687.548

b. Belanja Modal : Rp. 771.805.495
3. Rincian Pendapatan

a. Retribusi Daerah : Rp. 8.500.000

Realisas : Rp. 13.300.000.

Data Anggaran dan Realisasi DPPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 21.
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Katingan

NO.	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	REALISASI		FISIK (%)
			KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA DAERAH				
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (I)	6,039,692,616	5,749,870,012	95.20	100.20
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72,889,072.00	71,886,570	98.62	103.62
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37,699,352.00	37,409,070	99.23	104.23
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35,189,720	34,477,500	97.98	102.98
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,413,050,721	4,205,082,996	95.29	91.67
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,359,761,841	4,152,205,096	95.24	91.67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35,728,544	35,537,900	99.47	104.47

NO.	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	REALISASI		FISIK (%)
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	17,560,336	17,340,000	98.75	103.75
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	1,300,040.00	1,200,000	92.30	97.30
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	1,200,000.00	1,200,000	100.00	105.00
	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	100,040.00	0	0.00	5.00
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	364,298,364.00	357,539,048	98.14	103.14
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	18,018,908.00	15,635,000	86.77	91.77
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	54,425,762.00	53,900,000	99.03	104.03
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	26,051,736.00	26,026,900	99.90	100.00
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	23,795,700.00	22,709,000	95.43	100.00
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	93,720,258.00	92,778,600	99.00	100.00
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	5,586,000.00	3,910,500	70.01	75.01
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	142,700,000.00	142,579,048	99.92	104.92
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	424,710,000.00	423,900,000	99.81	104.81
	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	424,710,000.00	423,900,000	99.81	104.81
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	349,328,899.00	288,844,970	82.69	87.69
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	134,600,000.00	126,509,970	93.99	98.99
	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	28,310,000.00	27,210,000	96.11	101.11
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	186,418,899.00	135,125,000	72.48	77.48
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (6)</i>	414,115,520.00	401,416,428	96.93	100.00
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	388,250,670.00	376,511,428	96.98	100.00
	<i>Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	25,864,850.00	24,905,000	96.29	101.29
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (II)	1,010,532,888.00	976,120,741	96.59	100.00

NO.	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	REALISASI		FISIK (%)
	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (1)</i>	1,010,532,888.00	976,120,741	96.59	100.00
	<i>Relasi Media</i>	550,000,353.00	547,999,652	99.64	104.64
	<i>Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat</i>	21,650,000.00	21,480,700	99.22	104.22
	<i>Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</i>	88,529,078.00	69,763,053	78.80	83.80
	<i>Pelayanan Informasi Publik</i>	41,700,396	41,551,212	99.64	100.00
	<i>Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik</i>	56,358,186	53,937,200	95.70	100.00
	<i>Diseminasi Informasi</i>	100,170,000	98,372,324	98.21	100.00
	<i>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	53,874,502	49,436,600	91.76	96.76
	<i>Penyusunan Strategi Komunikasi Publik</i>	53,605,000	53,555,000	99.91	100.00
	<i>Penyusunan Konten</i>	35,389,380	34,925,000	98.69	103.69
	<i>Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik</i>	9,255,993	5,100,000	55.10	60.10
C	<i>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</i>	3,713,359,059	3,646,889,151	98.21	100.00
	<i>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	3,713,359,059	3,646,889,151	98.21	100.00
	<i>Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda</i>	84,644,246	84,059,024	99.31	104.31
	<i>Koordinasi Penyusunan dan /Atau reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah</i>	53,677,976	53,543,700	99.75	104.75
	<i>Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE</i>	70,388,900	70,059,301	99.53	104.53
	<i>Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah</i>	364,457,087	319,746,183	87.73	92.73
	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas</i>	188,769,350	183,767,900	97.35	102.35
	<i>Belanja Operasi</i>	121,947,350	117,067,900	96.00	101.00
	<i>Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo</i>	3,116,000	3,090,000	99.17	104.17
	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE</i>	49,348,000	47,645,800	96.55	101.55
	<i>Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE</i>	2,898,957,500	2,884,977,243	99.52	104.52

NO.	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	REALISASI		FISIK (%)
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	209,473,613	208,150,750	99.37	104.37
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	209,473,613	208,150,750	99.37	104.37
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	56,845,973	55,568,200	97.75	102.75
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	152,627,640	152,582,550	99.97	104.97
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	75,949,187	75,462,390	99.36	100.00
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75,949,187	75,462,390	99.36	100.00
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	49,549,187	49,515,290	99.93	100.00

Tabel 22.
Pagu Pendapatan dan Realisasi Pendapatan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Fisik (%)
I.	Retribusi Daerah	8.500.000	13.300.000	156	100

Pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan selama Tahun 2025 bersumber dari dana APBD. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, permasalahan yang timbul adalah adanya perubahan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya dengan diterbitkannya Permendagri No 13/2006, dan Permendagri No. 59/2007 serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Ketentuan- ketentuan baru tersebut merubah mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan sistem pelaporan keuangannya.

Dari kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui rencana pelaksanaan selama Tahun 2025 masih terdapat pengelola keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan yang menuntut upaya peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah secara berkesinambungan. Selain itu juga dibutuhkan sistem informasi yang memadai agar pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan informasi yang akurat dan cepat (tepat waktu) serta dapat memberikan dasar yang dapat diandalkan bagi proses pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu sistem pengelolaan keuangan daerah yang memadai diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat diandalkan bagi proses pengambilan keputusan manajemen puncak dalam membuat kebijakan atas pelaksanaan pembangunan daerah.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan pada Tahun 2025 secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, namun demikian masih dijumpai beberapa masalah, antara lain :

1. Pengelolaan administrasi pengelolaan barang Instansi masih belum efektif.
2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur masih sangat terbatas.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan sering tidak tepat dengan waktu yang telah ditetapkan dikarenakan pengurangan dana/pagu akibat rasionalisasi.
4. Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung teknis, operasional dan dukungan dana.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan diatas, maka strategi yang digunakan sebagai pemecahan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang tersedia untuk melaksanakan pengelolaan barang milik Negara dengan baik.
2. Penambahan Sumber Daya Manusia yang profesional dan mengirim aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
3. Ketepatan waktu turunnya anggaran harus sesuai dengan waktu kegiatan.
4. Dengan tersedianya sarana prasarana pendukung teknis, operasional dan dukungan dana, maka kegiatan atau program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilaksanakan secara maksimal.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2018-2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dengan penilaian secara mandiri, **Total capaian kinerja keuangan** Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 memperoleh kategori realisasi keuangan **96.45 %**, dengan kategori tinggi dan **Total Capaian Kinerja** memperoleh **kategori berhasil** dengan nilai capaian **99.34%**.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

4.2 Rencana dan Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil pelaporan dan evaluasi LAKIP, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan menyusun rencana perbaikan kinerja yang berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja. Rencana dan tindak lanjut tersebut diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan agar lebih berorientasi pada hasil (outcome).

Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi penyempurnaan indikator kinerja agar lebih terukur dan relevan, peningkatan kualitas data dukung dan sistem pelaporan kinerja, serta penguatan koordinasi dan pengendalian internal dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, dilakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem akuntabilitas kinerja, termasuk integrasi data kinerja dan keuangan, guna meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan.

Melalui pelaksanaan rencana dan tindak lanjut tersebut, diharapkan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan dapat terus meningkat pada periode berikutnya, serta mendukung pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip SAKIP.

